

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

Pemilihan presiden dan wakil presiden atau yang di singkat pilpres merupakan pesta demokrasi yang di seleggarakan oleh suatu negara tertentu dengan tujuan untuk memilih dan mencari sosok pemimpin baru yang nantinya akan memimpin suatu negara tersebut. Dengan melibat masyarakat secara langsung, yang mana masyarakat berham menentukan pilihanya sendiri untuk memilih sosok yang mereka inginkan.

Pemilihan umum presien dan wakil presiden adalah memilih sosok pemimpin dalam suatu negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pemilihan presiden dan wakil presiden yang di selenggarakan di suatu tempat yang manat teletak Di Parit Wa'gattak Dusun Turih Desa Pal Ix Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya di menangkan oleh pasangan Prabowo-Sandi dengan memperoleh 172 suara. Berbanding dengan pasangan jokowi-ma,ruf amin hanya memperoleh 05 suara, padahal kita ketahui pasangan ini merupakan sosok dari latar belakang menganut NU, sedangankan di desa tersebut mayoritas penganut NU.

Berdasarkan data yang diperoleh pada perilaku kaum nahdatul ulama pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Parit Wa'gattak Dusun Turih Desa Pal Ix Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, maka penulis tertarik untuk mencermati lebih lanjut terkait dengan rendahnya tingkat kepercayaan kaum NU pada pasangan Jokowi-Amin pada pilres tahun 2019.

2.2. Perilaku Politik

Kajian menyangkut perilaku merupakan pendekatan yang muncul setelah adanya Perang Dunia II. Pendekatan ini dipengaruhi oleh studi ilmu sosiologi dan psikologi. Salah satu corak pemikiran pokok dari pendekatan perilaku adalah menyangkut perilaku politik, atau kekuasaan, atau keyakinan politik. Perilaku Politik memiliki beragam definisi atau pemaknaan. Lasswell (dalam Varma 2003) memberikan penjelasan bahwa perilaku politik yaitu: “Pertama, perilaku politik selalu memiliki orientasi pada suatu nilai dalam proses politik yang berlangsung yang merupakan satu bagian. Kedua, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa mempertahankan kejadian masa lampau. Para sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendekatan perilaku politik ini adalah Gabriel A. Almond (struktural functional analysis), David Easton (general systems analysis), Karl W. Deutsch (communications theory), David Truman, Robert Dahl, dan sebagainya. Salah satu pemikiran pokok dari para pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa perilaku politik, atau kekuasaan, atau keyakinan politik. (Budiardjo 2008: 10).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku politik memiliki orientasi yang meliputi dimensi nilai dan dimensi waktu. Selain itu, dalam perilaku politik menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai, dimensi nilai menunjukkan suatu hal baik yang bersifat abstrak atau konkret yang dilaksanakan dan diperebutkan. Sementara dimensi waktu mengacu pada adanya relasi secara langsung antara perilaku politik dengan latar belakang perilaku politik sebelumnya dan perilaku politik yang akan datang.

Secara sederhana, perilaku politik dapat dipandang sebagai sebuah pikiran dan tindakan seseorang yang berkaitan dengan proses politik. Lebih lanjut, menurut Sastroatmojo mendefinisikan perilaku politik secara lebih rinci yakni sebagai berikut: “Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena di samping perilaku politik masih ada perilaku lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan sebagainya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik. Perilaku politik berkenaan dengan tujuan berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut yakni tujuan masyarakat secara umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun pada dasarnya perilaku politik merupakan bagian dari perilaku secara umum, akan tetapi perilaku politik tentunya berbeda dengan perilaku lainnya seperti dalam konteks ekonomi, keagamaan, budaya; dan bentuk perilaku lainnya. Karena pada dasarnya perilaku politik selain terkait dengan urusan kekuasaan yang mana dapat memiliki otoritas tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga terkait dengan upaya untuk mencapai tujuan masyarakat secara umum. Perilaku politik adalah proses-proses atau kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik.

Harold d. Lasswell yang dikutip oleh S.P. Varma dalam Mufti (2012:87),

memberikan catatan penting mengenai perilaku politik yaitu: *Pertama*, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan satu bagian. *Kedua*, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Dari dua catatan perilaku politik tersebut, jelas bahwa perilaku politik memiliki dimensi orientasi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai; dimensi nilai lebih menunjukkan suatu hal, baik abstrak maupun konkret yang diperbuat, dirumuskan, dilaksanakan, dan diperebutkan; sedangkan dimensi waktu menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latar belakang perilaku politik sebelumnya, serta berhubungan langsung dengan perilaku politik yang akan berkembang pada masa akan datang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi orientasi dan nilai lebih baik menunjukkan bahwa perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Perilaku politik dapat di rumuskan sebagai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, diantara kelompok dan individu dalam masyarakat menyangkut proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan-keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Menurut Robert K carl bahwa perilaku politik adalah suatu telaah mengenai kelakuan manusia dalam situasi politik. (Ramlan Surbakti 2012:15)

Secara umum perilaku politik dapat diartikan sebagai buah pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga dan pemerintahan serta antara kelompok individu dalam masyarakat untuk proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik (2008:24) mengatakan bahwa perilaku politik itu merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.

Dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan umum secara langsung, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penelitian ini Perilaku politik dapat dibagi dua, yaitu: Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut (Surbakti, 2012:15-16), yakni :

1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah.
2. Perilaku politik warga Negara biasa (baik individu maupun kelompok).

Menurut Sobolim (2013:76) Perilaku politik atau (Politic Behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Perilaku politik juga bisanya di pahami sebagai tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan - tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobbying, kaukus, kampanye dan demonstrasi)".

Setiap manusia pasti memiliki perilaku (tindakan) tersebut, yakni suatu totalitas dari gerak motorik, persepsi dan juga fungsi kognitif dari manusia. Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
2. Terjadi pada situasi tertentu,
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu. (Jack C. Plano dkk dalam Moh. Ridwan. 2007:12)

Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah:

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat)
- c. Ikut serta dalam pesta politik
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas

- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku. (Sobolim, 2013).

2.3. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih secara sederhana dapat dimakanai sebagai tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau cocok. Perilaku pemilih dapat dikaitkan dengan adanya proses pemilihan umum di suatu negara atau daerah tertentu. Sementara untuk lebih jelasnya, Surbakti mendefinisikan perilaku pemilih sebagai: “aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum (pilkada secara langsung). Bila voters memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.

Pendapat di atas, semakin memperjelas bahwa perilaku pemilih sangat erat kaitannya dengan proses pemilihan umum, karena berkaitan dengan sikap memilih atau tidak memilih seseorang. Adapun, beberapa bentuk atau jenis perilaku pemilih yang dimaksud yakni dapat meliputi kegiatan pemilih pada saat proses kampanye, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam partai politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara atau apabila dalam konteks Indonesia disebut pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sehingga dalam kontes pemilihan umum di Indonesia, pemilih haruslah WNI dan berusia 17 tahun keatas

Dalam proses perilaku pemilih individu atau seseorang, suatu perilaku pemilih dapat merujuk pada adanya persepsi positif dan negatif. Hal ini merujuk pada pendapat berikut: “Apabila suatu persepsi positif, maka pemilih cenderung melakukan pemilihan dalam konteks presiden atau partai yang sedang berkuasa, sebaliknya apabila persepsinya negatif, maka pemilih akan lebih cenderung melakukan pilihan terhadap calon presiden atau partai yang dianggap sebagai oposisi.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses memilih, seorang pemilih cenderung dapat diklasifikasikan sebagai pemilih yang memiliki persepsi positif dengan memilih presiden atau partai politik yang sedang berkuasa, sementara bagi pemilih yang memiliki persepsi negatif memiliki keenderungan untuk memilih opsi lain yakni memilih pihak yang menjadi oposisi. Secara garis besar, perilaku pemilih memiliki beberapa model pendekatan yang meliputi model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional atau model ekonomi-politik. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan masing-masing asumsi dan faktor yang ditawarkan dari ketiga model tersebut.

Perilaku pemilih dalam pemilu juga dianalisis oleh Schumpeter dalam Firmanzah (2007:101-102). Menurut dia pemilih mendapat informasi politik dalam jumlah besar atau (overload) dan beragam. Seringkali informasi yang diperoleh berasal dari berbagai macam sumber yang sangat mungkin bersifat

kontradiktif. Di tengah-tengah informasi yang melimpah ini pemilih dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit untuk memilih-milih informasi.

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan ke dalam dua kubu yaitu ; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan (Fadillah Putra , 2008 : 201). Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan. Perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. Dimana pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya.

Jika dikaitkan dengan Pemilu, warga negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan daerahnya. Deskripsi Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh

faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Munir Mulhan (2009:37) melihat perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.

Menurut Kavanagh (dalam Sitompul, 2008:18), Perilaku politik pemilih dapat dianalisis dengan 5 (lima) pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar. Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan "upaya untuk menghubungkan, sebisa mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif." Bagi Talcott Parsons, "fungsionalisme struktural" mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran.

Dalam pendekatan struktural, kita dapat melihat kegiatan pemilih ketika memilih, partai politik sebagai produk dari konteks struktur yang luas seperti

struktur sosial masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat, sistem kepartaian, sistem pemilu, dan program yang ditonjolkan partai-partai peserta pemilu. Dalam model ini, tingkah laku politik seseorang termasuk dalam penentuan pilihan ditentukan oleh pengelompokan sosial, agama, bahasa, dan etnis/suku. Dalam pendekatan ini melihat bagaimana perilaku pemilih dalam memilih berdasarkan kelas sosial, agama, bahasa, dan suku atau etnis. Dalam memilih jika kita lihat dari sisi pendekatan ini maka para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan subsistem pada penjelasan sebelumnya dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang akan merubah pemikiran mereka dalam menentukan pilihan.

b. Pendekatan Sosiologi atau Sosial Struktural

Istilah “Pendekatan” merupakan kata terjemahan dari bahasa inggris, approach. Maksudnya adalah sesuatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu. Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Jadi kalau diambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk

memahami dalam hal ini kajian sosiologi antropologi.

Sosiologi berusaha memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Sosiologi dan antropologi saling menunjang dari segi teori maupun konsepnya. Konsentrasi sosiologi pada masyarakatnya, sedangkan konsentrasi antropologi pada kebudayaannya. Antara keduanya jelas-jelas tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat dalam kelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pendekatan Antropologi berusaha masyarakat melalui kebudayaan, semua unsur kebudayaan adalah kelompok manusia sebagai satu-satunya jenis makhluk yang memiliki potensi budaya, agama, mempunyai keyakinan dan pengetahuan untuk menerima dakwah.

Pendekatan sosiologi cenderung menempatkan kegiatan memilih dengan mengaitkan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin tempat tinggal (kota ataupun desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan atau agama.

Dalam pendekatan ini, Bahwa seorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang pemilih. Setiap lingkungan social memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tenang tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

c. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologi adalah suatu metodologi untuk mendekati, menelaah, dan menganalisis suatu gejala atau masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Dalam hal ini, metodologi pendekatan, penganalisan, dan penelaahan gejala dan masalah geografi. Pendekatan ini menggunakan wilayah sebagai sasaran utama dalam melihat perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Manusia dalam hal ini tidak boleh diartikan sebagai makhluk biologis semata yang setara dengan makhluk hidup lainnya, namun adalah sosok yang dikaruniai daya cipta, rasa, karsa, karya atau makhluk yang berbudi daya.

Pendekatan ekologis relevan bila dalam daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih yang didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku-bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat memengaruhi perubahan komposisi pemilih terhadap perubahan pilihan mereka.

d. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologi sosial menjelaskan bahwa tingkahlaku pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat. Pendekatan Psikologi sosial juga bisa menjelaskan bagaimana sikap (*attitude*) dan harapan (*expectation*) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegangan teguh pada tuntutan sosial (*conformity*).

Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum adalah berupa identifikasi partai.

Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atau partai – partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Dalam hal pendekatan psikologis, seperti namanya, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai dalam mempengaruhi pemilih.

Pendekatan psikologi lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat (walikota atau parlemen) karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima.

e. Pendekatan Rasional

Menurut prespektif Pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Yang dilihat bukanlah ongkos memilih, melainkan suara yang terkumpul dapat memengaruhi hasilnya. Hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang mencalonkan diri dalam pemilu. Bagi masyarakat banyak yang perhitungan untung rugi berkaitan dengan partai apa yang akan dipilih dan termasuk memutuskan bagaimana seseorang

harus memilih atau tidak memilih. Disini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu mengutamakan *self-interest* (Rika 2009:45).

Pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Kedua, kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandaipandai membuat strategi dalam kampanye agar pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut.

Ketiga adalah pilihan rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pertimbangan untung ruginya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penjelasan sebelumnya dipersempit atau diperkecil menjadi tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Pendekatan sosiologi sendiri lebih menekankan akan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrument kemasyarakatan seseorang, seperti status sosial ekonomi yang terdiri dari

pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa perilaku pemilih adalah perilaku maupun aktivitas yang berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai dengan pelaksanaan aktivitas politik secara berkala.

2.4. Pendekatan dalam Perilaku Pemilih

2.4.1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam kajian perilaku pemilih dikenal juga dengan istilah madzab Columbia yang mulai muncul sekitar tahun 1940an. Pendekatan ini secara sederhana dapat dipahami sebagai pendekatan yang memilihat suatu kegiatan memilih individu atau kelompok yang memiliki kaitannya dengan konteks sosial. Lebih jelasnya, Hutomo menjelaskan bahwa: “pendekatan sosiologis dalam menjelaskan perilaku Memilih adalah masyarakat dalam menetapkan pilihannya saat pemilihan umum banyak dipengaruhi faktor prinsipprinsip kesamaan karakter sosilogis, maksud dari faktor prinsip kesamaan sosiologis ini terbagi menjadi dalam beberapa hal yang dalam penjelasan nanti banyak disebutkan dan dituliskan dalam beberapa literatur.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa menjelaskan bahwa kecenderungan memilih seseorang sangat dipengaruhi oleh kesamaan sosilogis. Selain itu, pendekatan ini memiliki asumsi dasar bahwa setiap individu astinya terikat dengan lingkungan sosialnya baik itu lingkungan keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan tiap individu tersebut didorong untuk menyesuaikan dirinya dengan perilaku lingkungan sosialnya.

Selain itu, pendapat yang lain dikemukakan oleh Yustiningrum dan Ichwanuddin yang mana menambahkan bahwa: “Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada. Dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat, banyak sarjana ilmu politik biasanya menunjuk tiga faktor utama sebagai indeks paling awal dari pendekatan ini yaitu: status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal.”

Penejelasan tersebut menyatakan bahwa sejatinya, pemilih tidaklah independen dalam melakukan pilihan, karena pada dasarnya lingkungannya telah secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemilih. Bahkan pengaruh tersebut terkadang dapat cenderung memaksa. Tiga faktor dalam perspektif ini yakni status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal. Sehingga pemilih pada akhirnya mampu terpengaruh dikarenakan tekanan tersebut. Disamping itu, ada juga yang menyertakan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi secara lebih detail menjelaskan beberapa faktor dalam memberikan pengaruh pada perilaku pemilih secara sosiologis yang mana meliputi: “faktor kelas sosial, yang meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan; agama dan tingkat religiusitas; ras, etnik, atau sentimen kedaerahan; domisili, yaitu antara perdesaan dan perkotaan; jenis kelamin; dan usia sebagai faktor-faktor sosiologis yang dianggap mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui secara rinci bahwa ada peran kelas sosial yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pendekatan sosiologis. Hal ini dikarenakan kelas sosial juga mengacu pada konteks lingkungan sosial pemilih. Selain itu, faktor kelas sosial ini juga tidak hanya mengacuk pada letar belakang sosial seseorang saja, namun juga menyangkut kemampuan seseorang di bidang ekonomi seperti pekerjaan dan tingkat pendapatan. Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada.

2.4.2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologi secara sederhana dapat dipahami bahwa perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh adanya interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal individu. Pendekatan ini menjelaskan menyangkut bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat membentuk tindakan serta tingkah laku dalam proses pemilihan umum. Pendekatan ini menggunakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku memilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang. Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya.

Menurutnya psikologi dapat menjelaskan mengapa seseorang memiliki

pilihan tertentu yang dapat dijelaskan oleh tiga fungsi sikap. Fungsi sikap pertama adalah fungsi kepentingan, dimana tiap pilihan yang dipilih oleh setiap orang didasarkan untuk pemenuhan kepentingannya secara pribadi. Fungsi sikap kedua adalah fungsi adaptasi, bahwa dalam setiap pilihan yang ia ambil adalah bentuk dorongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya misalnya seseorang terpaksa untuk memilih calon tertentu karena berada dibawah tekanan

Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang. Pendekatan psikologis pertama kali dielakna oleh ahli ilmu politik dari Universitas Michigan. Pendekatan ini memiliki tiga pusat perhatian yakni sebagai berikut: "(1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat; dan (3) identifikasi partai atau partisanship. Menurut pendekatan ini, yang berpengaruh langsung terhadap pilihan pemilih bukan struktur sosial, sebagaimana dianalisis oleh pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), melainkan faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemilih."

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa dalam konteks perilaku memilihnya, individu cenderung lebih menekankan pada penilaian pribadi terhadap kandidat yang akan dipilihnya. Selain itu, pendekatan psikologis juga menekankan mengenai penilaian tema-tema yang dapat merujuk pada visi misi, program atau kebijakan. Dan janji politik yang ditawarkan oleh kadidat maupun partai politik. Pendekatan psikologis juga menekankan bahwa pilihan polotiks seseorang dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang, terikat pada persepsinya. Sehingga pendekatan psikologis ini lebih bersifat independen bagi

pemilih untuk menentukan pilihannya dalam proses pemungutan suara atau pemilihan umum.

Dalam pendekatan psikologis, terdapat beberapa isu khusus yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku pemilih seseorang. Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yakni berupa ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Isu-isu tersebut terdiri atas tiga isu yang mana meliputi beberapa aspek berikut ini: “(1) isu tersebut dapat ditangkap oleh pemilih; (2) isu tersebut dianggap sebagai hal yang penting oleh pemilih; (3) pemilih dapat menggolongkan atau mengidentifikasi posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun negatif.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam konteks pendekatan psikologis, isu yang dapat mempengaruhi haruslah mampu menjadi isu yang membuat tertarik pemilih. Karena dalam hal ini pemilih dapat menilai mana isu yang positif dan negatif, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya secara tepat kedepannya. Karena memang pada dasarnya pendekatan psikologis lebih menekankan pada sikap independen pemilih dalam menentukan sikap politiknya, karena menyangkut pilihan personal bukan dari lingkungan sosialnya.

2.4.3. Pendekatan Pilihan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu mereka menekan ongkos sekecilkecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik pun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

Pendekatan pilihan rasional dikenalkan oleh Anthony Downs. Pendekatan ini menjelaskan bahwa : “arena pemilihan umum itu seperti sebuah pasar, yang membutuhkan penawaran (partai) dan permintaan (pemilih). Dalam perspektif penawaran dan permintaan ala teori ekonomi, pemilih rasional hanya akan ada jika partai yang akan mereka pilih juga bertindak rasional. Seperti juga pemilih, partai mempunyai kebutuhan untuk memaksimalkan utilitas mereka, antara lain dari pendapatan pemerintah, kekuasaan, dan gengsi.”

Berdasarkan pada pandangan tersebut, Partai dan para politisi pada dasarnya adalah pencari kekuasaan, yang tujuannya mendapatkan dukungan suara setidaknya untuk ikut terlibat dalam pemerintahan. Partai yang sedang berkuasa akan memaksimalkan dukungan pemilih agar terpilih kembali, sedangkan partai oposisi bertujuan memaksimalkan dukungan untuk mengganti pemerintah yang ada. Bagi partai dan para politisi, fungsi sosial, seperti mengelola pemerintahan

dengan efektif atau meningkatkan standar hidup warga, adalah akibat atau hasil dari tindakan rasional mereka dan bukan menjadi tujuan mereka.

Lebih lanjut, dalam pendekatan pilihan rasional yang menggunakan perspektif dalam teori ekonomi yang menyatakan bahwa seseorang atau individu yang berpikir secara rasional akan tertarik terhadap cara biaya yang paling efektif dalam memaksimalkan apa yang diperoleh. Dalam konteks pemilu, teori ini pada dasarnya menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Dengan demikian pendekatan ini dapat membentuk sikap pragmatis pemilih.

Down (dalam Evans, 2002) menyusun lima kriteria rasionalitas yang membentuk karakter pemilih dengan pendekatan pilihan rasional sebagaimana beberapa aspek berikut ini: “(a) Individu dapat membuat sebuah keputusan ketika dihadapkan pada serangkaian alternatif pilihan; (b) Individu dapat menyusun preferensi dirinya dengan pilihan-pilihan yang ada secara berurutan; (c) Susunan preferensi tersebut bersifat transitif atau memilih dengan beragam alternatif; (d) Individu akan selalu memilih alternatif yang ia merasakan paling dekat (utama); dan (e) Jika dihadapkan pada berbagai pilihan di waktu yang berbeda dalam lingkungan yang sama, individu akan membuat keputusan yang sama” Kriteria teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang ia inginkan sebagai sebuah outcome, bagaimana pilihan-pilihan tersebut terkait dengan outcome, dan mempunyai seperangkat kriteria yang tetap untuk mengukur alternatif yang berbeda guna menjamin

dipilihnya sebuah alternatif setiap waktu.

Lebih lanjut, dari segi pemilih, pendekatan pilihan rasional terbagi dalam beberapa kategori yakni sebagai berikut: “(1) pemilih agitator, yang mempunyai informasi dan menggunakannya untuk mempengaruhi pemilih lain untuk memilih dengan cara yang sama dengan dirinya; (2) pemilih pasif, yang menggunakan informasinya untuk dirinya sendiri; (3) pemilih yang belum jelas pilihannya, karena tidak mempunyai informasi yang memadai; (4) pemilih loyalis, yang menggunakan informasi pada pemilu sebelumnya untuk memilih.”

Berdasarkan penjelasan di atas, pemilih rasional, dalam tindakan memilihnya ternyata tidak hanya bertindak secara pribadi, namun juga dapat mempengaruhi orang lain. Hal ini karena atas dasar kepentingan personalnya maka berusaha untuk mempengaruhi pemilih yang lain agar sesuai dengan pilihannya. Di samping itu, juga ada pemilih yang bersifat loyal, karena merasa masih mendapat keuntungan dari pilihan lamanya.

Terkait pemberian pilihan atau suara, Downs (2002) menekankan batasan mengenai isu yang termasuk dalam konteks kajian pendekatan rasional yang mana lebih mengarah pada isu ekonomi seperti isu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan beberapa isu ekonomi lainnya. Hal ini juga menjadi pertimbangan dari kandidat atau partai politik dalam menentukan strategi kampanye yang digunakan dalam mengikat pemilih rasional yang selalu menekankan aspek ekonomis dalam menentukan pilihannya.

Pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor

mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

2.5. Tipe Pemilih

2.5.1. Pemilih Rasional

Salah satu jenis pemilih yakni pemilih rasional. Peneliti jenis ini memiliki orientasi pada “*policy-problem-solving*” dan berorientasi rendah pada faktor ideologis. Firmansyah menjelaskan bahwa: “pemilih rasional lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Program kerja atau *platform* partai dapat dianalisis dalam dua hal yakni kinerja partai di masa lampau (*backward looking*) dan tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada (*Forward Looking*).”

Kedua aspek tersebut sama-sama mempengaruhi perilaku pemilih, karena pemilih tidak hanya melihat program kerja atau *platform* partai yang berorientasi masa depan, tetapi juga melakukan analisis atau penilaian apa yang dilakukan partai atau kandidat tertentu di masyarakat. Kinerja tersebut biasanya dapat dilihat dari citra atau reputasi partai atau kandidat di masyarakat.

Selain itu, pemilih jenis ini tidak lah telalu mengandalakan aspek ideologis suatu partai politik atau kandidat tertentu. Faktor seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya, dan agama memang dipertimbangkan, namun tidak lah signifikan pengaruhnya. Pemilih dalam konteks ini melepaskan aspek-aspek

tradisional yang bersifat dogmatis dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya. Oleh karena itu, apabila partai politik atau kandidat tertentu ingin mempengaruhi perilaku politik, maka harus mengedepankan aspek logis akan beberapa permasalahan atau isu seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional, dan lain-lain.

2.5.2. Pemilih Tradisional

Pemilih tradisional merupakan pemilih jenis ideologis yang sangat kuat dan tidak terlaui melihat kebijakan partai politik atau kandidat tertentu dalam penentuan pilihan. Dalam konteks Indonesia, masih menjadi pemilih mayoritas di Indonesia. hal ini dikarenakan secara umum, masyarakat Indonesia masih berpegang pada ideologi, meskipun fanatisme sudah mulai berkurang. Lebih lanjut, Firmansyah menjelaskan pemilih tradisional sebagai berikut: “Pemilih jenis tradisional sangat menekankan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk ukuran dalam memilih sebuah partai politik atau kandidat tertentu. Selain itu, pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos, dan nilai historis suatu partai politik yang mereka dukung.”

Pemilih jenis tradasioanal tergolong pemilih yang sangat loyal dan mudah untuk dimobilisasi. Apa yang dikatakan oleh *leader* politik merupakan suatu kebenaran dan sulit untuk dibantah. Ideologi dianggap sebagai suatu landasan dalam membuat suatu keputusan serta bertindak, dan terkadang kebenarannya tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, ujaran dari pemimpin politik, dianggap sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak.

2.5.3. Pemilih Kritis

Pemilih jenis kritis merupakan kombinasi antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau kontestan dalam menuntaskan atau kandidat menuntaskan permasalahan bangsa dan negara dan terkait dengan ikatan ideologis tertentu. pentingnya ikatan ideologis menjadikan loyalitas pemilih sebuah partai atau kandidat cukup tinggi dan tidak mudah pemilih rasional untuk berpaling untuk memilih partai atau kandidat lain.

Pemilih model kritis memiliki dua mekanisme yang menyebabkan terbentuknya jenis pemilih ini. Hal ini merujuk pada penjelasan berikut ini: “Pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan menentukan kepada partai politik mana mereka akan berpijak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan baru kemudian mencoba memahami nilai dan paham yang melatarbelakangi sebuah kebijakan.”

Pemilih jenis ini dalam proses penentuan pemilihan partai politik dan kandidat tertentu berusaha untuk menilai secara menyeluruh karena memadukan aspek ideologis dan program atau kebijakan yang ditawarkan. Pemilih jenis kritis harus mampu dikelola dengan sebaik mungkin oleh partai politik atau kandidat tertentu. pemilih memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai, sementara kemungkinan kekecewaan yang dapat berakhir frustrasi.

2.6. Pemilihan Umum

2.6.1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Berdasarkan kebijakan terbaru tentang pemilu yakni Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Dengan demikian pemilu merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun para anggota legislatif ditingkat pusat maupun daerah. Pemilihan Umum juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang

hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan berikut ini: “pemilu sebagai prosedur demokrasi (atau juga biasa disebut pesta demokrasi) adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang Negara. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan pemilu merupakan bukti penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Selain itu, pemilu menjamin kekuasaan yang terbentuk adalah kekuasaan yang demokratis yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian pemilu juga menjamin kedaulatan rakyat.

Dalam konteks Indonesia Pemilihan Umum terdiri atas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Selain itu, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

2.6.2. Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraannya, pemilihan umum memiliki asas-asas yang menjadi acuan dan nilai penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Asas-asas ini menjadi nilai yang perlu ditatati dan dilaksanakan bersama oleh seluruh komponen peserta pemilu baik penyelenggara pemilu, partai politik, maupun kandidat yang berpartisipasi dalam kontestasi politik pada pemilu. Maka dari itu asas-asas pemilu tersebut terdiri atas beberapa aspek berikut ini:

- a. *Langsung*, yaitu rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hatinya.
- b. *Umum*, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pelaksanaan pemilihan umum tidak diskriminatif dan menjamin kesempatan terlibat kepada semua warga negara.
- c. *Bebas*, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
- d. *Rahasia*, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa

- pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- e. *Jujur*, yaitu setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak dapat bersikap dan bertindak secara jujur.
 - f. *Adil*, yaitu setiap pemilih Dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa agar pelaksanaan pemilu dapat benar-benar mewujudkan demoratiasi pada suatu negara dan menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di samping itu, untuk mendukung pelaksanaan asas- asas pemlihan umum, maka harus memenuhi beberapa prinsip yang meliputi prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, prposional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Asas-asas penyelenggaraan pemilu ini diharapkan mampu mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di Indonesia, sehingga akan terpilih pemimpin politik yang demokratis pula dan memiliki amanat yang tinggi kepada rakyat.

2.7. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Presdiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan secara demokratis dan langsung untuk menentukan Presiden dan Wakil Presdien yang menjadi pemimpin negara dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pelaksanaan pemilu Presiden secara langsung di Indonesia dilakukan pertama kali di tahun 2004 hingga saat ini. Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan

calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit dari 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2.7.1. Sistem Pemilihan Presiden

Pemilihan presiden sebagai bagian dari pemilihan umum yang diadakan pertama kali pada pemilihan umum tahun 2004. Negara Indonesia saat ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) dan juga sebagai kepala negara (*head of state*).

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden mempunyai karakteristik sendiri disbanding dengan pemilihan umum lainnya. Karena walaupun telah diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik pencalonannya, namun belum tentu konstituen partai politik mendukungnya, karena dalam pemilihan umum ini figure dan *track record* calon sangat mempengaruhi.

Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, dijelaskan: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian didalam pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dilaksanakan: pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum.

Dengan disahkan pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara otomatis mencabut kewenangan MPR-RI untuk memilih presiden dan wakil presiden dan beralih pada ketentuan bahwa yang berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah hak rakyat Indonesia, oleh karena itu keterlibatan rakyat dan menguatkan kedaulatan rakyat semakin diakui karena rakyat bisa secara langsung memilih pemimpin negaranya sendiri. Secara normatif, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan sistem pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, dimana rakyat diberikan peran yang besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional.

Ada dua alasan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yaitu:

- a. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung lebih membuka bagi tampilannya presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri.
- b. Untuk menjaga kestabilan pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

2.8. Teori Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik. Samuel P. Huntington (1990:16) berpendapat bahwa perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk

kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, dan mencari dukungan bagi seorang calon atau tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Menurut Mahendra (2005:75), perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu. Kemudian, Kristiadi (1996:76) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasional pemilih atau disebut teori voting behavioral. Lebih lanjut Plano (1985:280) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.

Sementara perilaku pemilih menurut Surbakti dalam Efriza (2012:480) adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan disini adalah untuk memilih dan tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Pemberian suara (voting) secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menentukan pendapatnya dan ikut dalam menentukan konsensus diantara anggota kelompok terhadap keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Berdasarkan pendapat yang diuraikan di atas, maka perilaku pemilih dapat diartikan sebagai sebuah tindakan seseorang maupun sekelompok orang (masyarakat) yang berkaitan alasan dan latar belakang seseorang yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan

memilih.

Firmanzah (2007;120) mengartikan pemilih sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka mengetahui dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suara kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang seperti masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi yang dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik.

Menurut Prihatmoko (2005: 46) pemilih yang merupakan bagian dari masyarakat luas bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri beragam kelompok, terdapat kelompok masyarakat memang non-partisan, di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu.

Sedangkan menurut Fatah dalam (Efrize, 2012: 487), secara umum pemilih dikategorikan kedalam empat kelompok utama yaitu:

1. Pemilih Rasional Kalkulatif, pemilih tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relative tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya.
2. Pemilih Primordial, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk dalam tipe ini biasanya

menggagungkan simbol-simbol yang mereka aggap luhur. Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili di perkampunga.

3. Pemilih pragmatistis, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Biasanya mereka tidak begitu peduli dan sama sekali tidak keritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa kandidat.
4. Pemilihan emosional, kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan prasaan. Pilihan politik yang didasari rasa ibah misalnya adalah pilihan yang emosional. Atau pilihan dengan alasan romantisme, seperti kagum dengan ketanpanan atau kecantikan kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan bawah atau pemilih memula.

2.9. Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan merupakan uraian secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau yang telah diteliti. Penelitian tersebut harus ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penjelasan mengenai penelitian-penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

1. Rizky Amani, Universitas Jendral Soedirman Banyumas 2018. Dinamika perilaku elite politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam pemilihan Kepala Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial yang diteliti.

Mengungkapkan bahwa sikap netral yang mengikuti kebijakan NU secara organisatoris tidak melibatkan diri dalam politik praktis lembaga resmi NU, termasuk badan oonom di semua tingkatan. Pada penelitian diatas persamaan yang ingi saya kaji adalah perilaku pemilih nahdlatul ulama dalam pemilu. Dari segi perbedaan terletak pada lokasi penelitian.

2. Ahmad wahyu Ilhami, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2019. Perilaku Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya Dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Bentuk perilaku politik Muslimat NU Surabaya adalah sebagai mesin politik dan komoditas politik. Pada penelitian ini menggunakan jenis peneitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian di atas persamaan yang ing peneliti kaji adalah Muslimat NU sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi dan jenis pemilu.

2.10. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir atau kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kemudian dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan formula sintesis antara variabel penelitian. Sintesa hubungan variabel tersebut digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian. Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran adalah bentuk strategi konseptual yang mengaitkan antara teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan, sehingga dalam hal lebih mengacu pada tujuan penelitian tersebut dijalankan.

Kerangka pikir merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam sebuah proses penelitian, karena dengan adanya kerangka pikir peneliti dapat dengan mudah meneliti suatu fenomena yang terjadi dan juga dapat menjelaskan alur pikir peneliti dengan teori yang relevan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang membentuk sebuah korelasi antara teori dan fakta dilapangan tersebut kemudian menghasilkan sebuah tujuan dari penelitian yang akan diteliti.

Gambar 2.1.

Kerangka Pikir Penelitian

